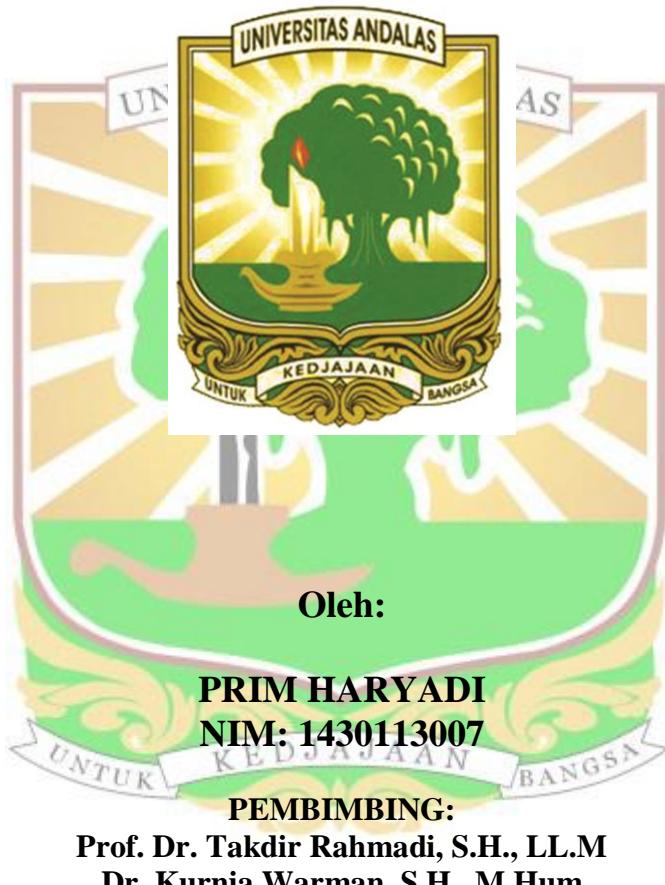


## **DISERTASI**

### **PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERDATA DI INDONESIA**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2017**

## INTISARI

Timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup telah mendorong pemerintah mengundangkan UU No. 4 Tahun 1982 yang kemudian digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997 dan terakhir berlaku UU No. 32 Tahun 2009 yang menjadi sumber utama lahirnya hukum lingkungan di Indonesia. Hukum lingkungan mengandung tiga bidang hukum yaitu hukum administrasi lingkungan, hukum pidana lingkungan dan hukum perdata lingkungan. Penelitian ini membatasi kajiannya terhadap pengembangan hukum lingkungan perdata melalui gugatan dengan tiga permasalahan penelitian yaitu bagaimana pengembangan hak gugat, bagaimana pengembangan hukum pembuktian dan bagaimana pengembangan penentuan ganti kerugian dan biaya pemulihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Dalam bidang pengembangan hak gugat, hakim berperan menghasilkan doktrin hak gugat baru yang belum diatur dalam undang-undang yang berlaku saat gugatan diajukan yaitu gugatan lembaga swadaya masyarakat pada tahun 1988 dalam kasus WALHI melawan PT Inti Indorayon dkk dan hak gugat warga (*citizen lawsuit*) dalam kasus Komari dkk melawan Walikota Samarinda dkk. Dalam bidang pengembangan hukum pembuktian, hakim telah menerapkan asas kehati-hatian untuk menyelesaikan masalah ketidakpastian dalam pembuktian dan tanggungjawab mutlak dalam kegiatan-kegiatan berdampak negatif pada kawasan hutan. Dalam bidang pengembangan penentuan ganti kerugian, hakim telah mengakui kerugian ekologis yang diukur dalam bentuk moneter.

Walaupun Indonesia adalah negara dengan sistem hukum sipil atau sistem Eropa Kontinental yang menempatkan kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif sebagai pelaku utama fungsi pengembangan hukum melalui pengundangan undang-undang, penelitian untuk distripsi ini membuktikan bahwa kekuasaan judikatif yang direpresentasikan oleh hakim yang mengadili perkara-perkara lingkungan melalui putusan-putusan mereka ternyata telah melaksanakan fungsi penting dalam pengembangan norma-norma hukum lingkungan perdata. Hakim dengan menggunakan interpretasi gramatika, komparatif, ekstensif dan sosiologis terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah menghasilkan putusan-putusan yang mengandung pengembangan norma-norma hukum lingkungan baik dalam arti formil maupun materiil.

Kata-kata kunci: pengembangan, lingkungan, hukum, hakim

## ABSTRACT

The rise of environmental problems has encouraged the government to promulgate the Act number 4 of 1982 which was then replaced by the Act number 23 of 1997 and lastly the Act number 32 of 2009 which is currently in force. These acts become the main sources of the birth of environmental law in Indonesia. Environmental law comprises three fields of laws namely administrative environmental law, criminal environmental law and private environmental law. This research limits to the study on development of private environmental law with three research questions namely how standing to sue, law of evidence and environmental damage as well as compensation have been developed. The research is carried out by using a juridical normative method.

In term of the development of standing to sue, the judges have played role in creating new doctrines of standing to sue such as a Non-Governmental Organization's standing to sue in the 1998 case of WALHI versus PT Inti Indo Rayon cs and citizen lawsuit in the case of Komari cs versus Mayor of Samarinda cs where the statute in force has not yet established such doctrines. In the development of law of evidence, the judges have applied precautionary principle to environmental cases where there are issues of uncertainty of the effects of activities and strict liability to activities which bring about negative impact of forest zones. In relation to development of the notion of damages, the judges have recognized those of ecological damages or losses that can be financially determined or measured.

Although Indonesia is a civil law state or follow the European system of law where the legislative and executive branches hold main power in development of law through statutory promulgation, the research of this dissertation discovers that the judiciary which are represented by the hearing judges in environmental cases have in fact performed important function in the development of private environmental laws. They have used grammatical, comparative, extensive and sociological methods of interpretations to the provisions of the statutory regimes and delivered their decisions that imply the development of both procedural and substantial rules of environmental law.

Key words: the development, environment, law, and judges.